

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA DI KOTA SAMARINDA**

**Sofiani Fajriah<sup>1</sup>, Endang Erawan<sup>2</sup>, dan Dini Zulfiani<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu: 1) pengawasan preventif (pencegahan), 2) pengawasan langsung, 3) pengawasan represif (pemulihan) dan faktor pendukung dan penghambat terkait efektivitas pelaksanaan pengawasan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, penelitian arsip dan dokumen pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data model interaktif.*

*Berdasarkan analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda yakni pengawasan preventif, pengawasan langsung, dan pengawasan represif. Ketiga pengawasan tersebut telah berjalan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Namun dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum efektif, dikarenakan masih banyaknya celah-celah pengawasan yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran di dalam Lapas. Seperti halnya pada pemeriksaan pintu masuk, terkadang pembesuk yang ingin mengunjungi Lapas masih terlewat dalam pemeriksaan petugas; masih banyaknya warga binaan yang membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan ke dalam Lapas, kurangnya jumlah petugas pengamanan yang ikut mengawal warga*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: sofianifajriah9@gmail.com

*binaan saat dirujuk kerumah sakit; fasilitas telepon yang tidak digunakan lagi; serta tidak adanya kegiatan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pengawasan, Warga Binaan, Lembaga Pemasarakatan*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerintah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat mempunyai tugas untuk melaksanakan amanah yang telah diembannya, namun bagaimana pun subjek pemerintah dalam hal ini aparaturnya tidaklah selalu senantiasa melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Perlu adanya suatu lembaga yang dapat mengawasi segala bentuk aktivitas yang dilakukan pemerintah. Hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menjalankan tugasnya. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka organisasi yang sehat di Indonesia akan terwujud. Seperti dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan pada pasal 1 ayat 1 mengemukakan bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dalam langkah perwujudan cita-cita tersebut, tentunya harus ada pengawasan yang baik dalam Lembaga Pemasarakatan sebagai mana yang telah tercantum dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Namun, dengan adanya razia-razia yang telah dilakukan masih saja ada narapidana yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda. Adapun warga binaan masih kedapatan membawa barang-barang yang seharusnya tidak diperbolehkan seperti, membawa handphone, panci maupun peralatan memasak, kabel charger, headset, korek, serta masih ditemukan sendok ataupun kayu didalam blok yang ditinggali para wargabinaan tersebut. Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, ditemukan bahwa adanya kekurangan-kekurangan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda, yakni dari segi fasilitas ruangan yang tidak memadai dengan jumlah warga binaan yang *overcrowding* atau kelebihan kapasitas yang mana berdampak pada ruangan serta fasilitas di Lembaga Pemasarakatan yang sangat terbatas; jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan) tidak berimbang dibandingkan dengan narapidana yang ada; pengawasan warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA yang dirasa kurang efektif, yang mana warga binaan masih kedapatan membawa barang-barang yang seharusnya tidak diperbolehkan di dalam blok yang ditinggali para warga binaan tersebut.

Karena warga binaan adalah orang yang telah melakukan pelanggaran hukum maka akan sedikit sulit untuk mengubah pola dan perilaku selama pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang yang terbiasa melanggar hukum akan sulit beradaptasi dengan aturan-aturan yang mengikat dan akan cenderung ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karenanya untuk mengantisipasi serta mengubah pola perilaku warga binaan harus ada pendekatan-pendekatan serta pengawasan yang dilakukan oleh petugas berwenang sehingga warga binaan akan terbiasa menjalankan aturan dan nyaman akan adanya peraturan-peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, serta melihat masalah-masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk memilih judul: Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terkait Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung terkait Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu Administrasi Negara, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati

fenomena-fenomena yang ada terkait Pengawasan Warga Binaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan serta aparatur-aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien.
  - b. Bagi Pemerintah maupun Lembaga vertikal terkait agar dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan serta agar dapat dijadikan referensi untuk bahan kebijakan pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Organisasi***

Silalahi (2011:424) mengatakan bahwa organisasi merupakan sarana bagi kerjasama yang efektif dan efisien. Organisasi adalah salah satu alat atau sarana yang digunakan oleh orang untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

### ***Pengawasan***

Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya (2015:157,163) mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Manullang (2009:173) mengatakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan apabila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, sebagaimana menurut Sarwoto (2010:101) teknik pengawasan terdiri atas:

1. Pengawasan langsung, ialah pengawasan yang dilakukan oleh manager atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan langsung ini dapat berupa:
  - a. Inspeksi langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.
  - b. Observasi ditempat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan.
  - c. Laporan ditempat, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan berbentuk:
  - a. Laporan tertulis, adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, yang dilaporkan secara berkala.
  - b. Laporan lisan, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun saran-saran. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah bahwa seringkali para bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja. Dengan kata lain para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.Sedangkan, Manullang (2009:176-178) mengatakan bahwa ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yakni:

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas:

- a. Pengawasan preventif, dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.
- b. Pengawasan represif, dimaksudkan untuk pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

### ***Lembaga Pemasyarakatan***

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

### ***Aparat Lembaga Pemasyarakatan***

Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

### ***Warga Binaan Pemasyarakatan/ Narapidana***

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut

masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud narapidana, anak didik Pemasarakatan dan klien Pemasarakatan ialah:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan.
2. Anak Didik Pemasarakatan adalah:
  - a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Balai Pemasarakatan)

### **Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, sehingga menampakkan atau menggambarkan secara jelas sesuatu hal diteliti tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka definisi konsepsional dalam penelitian terkait Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasarakatan ialah serangkaian kegiatan pengawasan yang mencakup pengawasan preventif, pengawasan langsung, dan pengawasan represif yang mana merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan dan Rutan sesuai dengan instrument peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena, keadaan serta fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda”.

### **Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan serta tujuan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Efektivitas pelaksanaan pengawasan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda, terkait penyelenggaraan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan mencakup tiga kegiatan seperti pengawasan preventif yakni berupa kegiatan-kegiatan pencegahan, pengawasan langsung berupa kegiatan-kegiatan penindakan, pengawasan represif yang berupa kegiatan-kegiatan pemulihan. Hal tersebut yang penulis jadikan sebagai indikator-indikator penelitian pada tulisan ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pengawasan preventif
  - b. Pengawasan langsung, dan
  - c. Pengawasan represif
2. Faktor pendukung dan penghambat terkait efektivitas pelaksanaan pengawasan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan kunci (*Key Informan*) dalam penelitian ini berjumlah satu orang yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, serta informan lain yang diharapkan membantu memberikan informasi tambahan berjumlah tujuh orang yaitu terdiri dari Kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), petugas pengamanan dua orang, warga binaan dua orang, petugas kesehatan/ perawat, serta pengunjung/pembesuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

#### 2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi lain, yaitu: peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, serta arsip-arsip lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan.
2. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan beberapa informan.
3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau arsip sebagai sumber data.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)  
Yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan, observasi, riset kepustakaan, serta dokumentasi data-data sekunder lainnya.
2. Kondensasi data (*Data Condensation*)  
Yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Penyajian Data (*Data Display*)  
Yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian yang baik merupakan pendekatan utama untuk analisis kualitatif yang tepat. Penyajian yang dimaksud meliputi banyak tipe dari matriks, grafik, kurva dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima.
4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)  
Yaitu data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Samarinda**

#### **1) Pengawasan Preventif**

Manullang (2009:176-178) mengatakan bahwa pengawasan preventif ialah pengawasan yang dimaksudkan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait pengawasan preventif yang dilakukan dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda adalah; melakukan pemeriksaan pintu masuk; melakukan tugas penjagaan; melakukan tugas pengawalan; melakukan pengeledahan; melakukan kegiatan inspeksi; melakukan kegiatan kontrol; melakukan kegiatan inteligen; melakukan pengendalian peralatan; melakukan pengawasan komunikasi; melakukan pengendalian lingkungan; melakukan penguncian dalam rangka pengamanan; dan melakukan penempatan dalam rangka pengamanan.

Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan terkait dengan pengawasan preventif tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan beserta jajaran yang berfungsi melakukan pengamanan atau yang lebih sering disebut satuan pengamanan sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik namun belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif. Dikarenakan masih adanya celah-celah dan kelalaian yang dilakukan meski penempatan petugas pengamanan sudah sepenuhnya terlaksana, serta masih adanya warga binaan yang bisa mengambil kesempatan melarikan diri saat di rujuk kerumah sakit. masih lemahnya pengawasan dikarenakan masih adanya warga binaan kedapatan membawa barang-barang yang seharusnya tidak diperbolehkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu perlu diadakannya evaluasi agar apa yang menjadi kesalahan dapat diperbaiki bersama serta bagian pengamanan dapat lebih ditingkatkan khususnya dalam menjalankan perannya. Sehingga kedepannya lingkungan warga binaan dapat menjadi kondusif dan tertib. Oleh sebab itu perlu diadakannya evaluasi agar apa yang menjadi kesalahan dapat diperbaiki bersama. Sehingga kinerja Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pengawasan preventif terlaksana lebih baik lagi kedepannya.

## **2) Pengawasan Langsung**

Menurut Sarwoto (2010:101) Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh manager atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait pengawasan langsung yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda adalah; melakukan penindakan terhadap perkelahian; melakukan penindakan penyerangan terhadap petugas; melakukan penindakan terhadap pelarian Melakukan penindakan terhadap percobaan bunuh diri dan/ bunuh diri; melakukan penindakan terhadap wabah penyakit dan lainnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan perannya seperti melakukan pencarian terhadap warga binaan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, serta menyediakan ruangan khusus sebagai hukuman bagi warga binaan yang melakukan keributan. Namun tetap diperlukan koordinasi serta evaluasi lebih lanjut terhadap pengawasan agar lebih maksimal dalam pengamanan dan diharapkan kasus-kasus pelarian bisa lebih di minimalisir atau bahkan jangan sampai ada warga binaan yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tanpa ada pengawalan dari satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun penindakan wabah penyakit masih belum

sepenuhnya efektif dikarenakan fasilitas obat-obatan yang tersedia masih sangat kurang. Serta perlunya pengawasan dan pengamanan lebih maksimal lagi terhadap barang-barang atau benda yang dapat digunakan warga binaan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Oleh sebab itu perlu diadakannya evaluasi agar apa yang menjadi kelemahan dapat diperbaiki bersama. Koordinasi antar petugas dengan petugas serta petugas dengan warga binaan juga harus terjalin dengan baik, agar kedepannya kinerja Lembaga Pemasyarakatan bisa lebih baik dari sebelumnya.

### **3) Pengawasan Represif**

Manullang (2009:176-178) mengatakan bahwa pengawasan represif dimaksudkan untuk pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait pengawasan langsung yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda adalah; Melakukan rekonsiliasi; melakukan rehabilitasi; melakukan rekonstruksi.

Adapun hasil keseluruhan penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda telah melaksanakan perannya dalam hal pengawasan represif terhadap warga binaan seperti melakukan kegiatan rekonsiliasi yang mana rekonsiliasi tersebut ialah kegiatan atau perbuatan pemulihan dengan cara perundingan secara damai antara petugas Pemasyarakatan dengan narapidana atau warga binaan. Namun dalam hal rehabilitasi belum bisa dilaksanakan karena adanya kendala-kendala pada anggaran, memang sangat disayangkan ketika Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki fasilitas rehabilitasi mengingat narapidana/ warga binaan terjerat kasus narkoba cukup banyak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA ini. Sedangkan untuk kegiatan rekonstruksi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

### **4) Faktor Pendukung dan Penghambat**

- a. Faktor Pendukung, yaitu: Dukungan Lembaga-lembaga hukum vertikal terkait serta adanya alat-alat penunjang keamanan.
- b. Faktor Penghambat, yaitu: Jumlah warga binaan yang kelebihan kapasitas/ overcrowding, kurangnya petugas pengamanan, pemeriksaan pintu masuk yang masih belum efektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda yakni pengawasan preventif, pengawasan langsung, dan

pengawasan represif. Ketiga pengawasan tersebut telah berjalan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Namun dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum efektif, dikarenakan masih banyaknya celah-celah pengawasan yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran di dalam Lapas. Seperti halnya dalam pengawasan preventif yakni pada pemeriksaan pintu masuk, terkadang pembesuk yang ingin mengunjungi Lapas masih terlewat dalam pemeriksaan petugas; masih banyaknya warga binaan yang membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan ke dalam Lapas. Jika dilihat dari pengawasan langsung juga masih kurang dalam jumlah petugas pengamanan yang ikut mengawal warga binaan saat dirujuk kerumah sakit; fasilitas telepon yang tidak digunakan lagi. Adapun dalam kegiatan pengawasan represif tidak adanya kegiatan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda untuk para warga binaan dengan kasus narkoba.

2. Faktor penghambat atau kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda antara lain jumlah warga binaan yang kelebihan kapasitas/*overcrowding*, kurangnya jumlah petugas pengamanan, serta pemeriksaan pada pintu masuk yang masih belum efektif.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang ditemukan peneliti dalam penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda ialah jumlah warga binaan yang *overcrowding* dan tidak berimbang dengan jumlah petugas pengamanan, yang mana berakibat pada pengawasan yang dilakukan serta minimnya fasilitas Lapas. Mengingat dalam Lapas Kelas IIA ini usaha-usaha kriminalisasi warga binaan masih banyak seperti melakukan percobaan bunuh diri, perkelahian, penyerangan serta percobaan pelarian, maka dari itu disarankan hendaknya disetiap pos terpasang monitoring untuk memantau disetiap titik-titik yang telah dipasang cctv dan monitoring tersebut dipasang disetiap pos penjagaan yang terdapat regu pengamanan, agar setiap regu pengamanan dapat memantau aktivitas warga binaan yang ada disetiap blok.
2. Permasalahan lainnya ialah tidak efektifnya pengawalan yang dilakukan saat merujuk warga binaan dirumah sakit, peluang kaburnya warga binaan Lapas ialah pada saat berada di rumah sakit, yang mana saat pergantian shift jaga inilah menjadi peluang untuk warga binaan kabur dari pengawasan petugas. Maka dari itu peneliti memberi saran agar memperbanyak jumlah petugas yang mengawal saat merujuk warga binaan serta berkoordinasi pada polisi untuk mendapatkan bantuan pengawalan.

3. Permasalahan lain juga terdapat pada pemeriksaan pada pintu masuk yang masih belum efektif, yang mana petugas terkadang tidak memeriksa pembesuk yang akan mengunjungi warga binaan karena jumlah pembesuk yang banyak serta petugas yang terbatas. Maka dari itu disarankan agar pada pintu masuk pembesuk serta ruang penjagaan pintu utama diberikan cctv, agar bagi petugas yang masih belum menjalankan tugasnya sesuai aturan bisa ditindak lebih tegas dan diberikan sanksi. Dengan jumlah petugas yang terbatas pada ruang pemeriksaan atau ruang penjagaan pintu utama inilah yang menyebabkan petugas lalai memeriksa saat pembesuk yang datang ramai. Perlu juga aturan tegas terhadap pembesuk yang masuk agar tidak berdesakan saat diruang pemeriksaan ini. Harus ada batasan jumlah orang saat memasuki ruang pemeriksaan atau penjagaan pintu utama, agar kedepannya walau saat ramai pun, petugas tetap melaksanakan pemeriksaan pada seluruh pembesuk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku:**

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Djatmiko, Yayat Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Manullang, M. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Miles, Huberman, dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sule, E. T., dan Saefullah, K. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana

Terry, George R. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara  
Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo  
Wukir, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*.  
Yogyakarta: Multi Presindo

**Dokumen-dokumen:**

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengawasan

Modul Teknik Pengamanan Di UPT Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015  
Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah  
Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013  
Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan  
Negara

Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

**Sumber Internet:**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan)